

ABSTRAKSI

PERANAN DINAS TENAGA KERJA TERHADAP PEMBINAAN TENAGA KERJA INDONESIA YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI (Studi Kasus Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan)

O L E H

DEDDY ALAMSYAH

NPM : 99.840.0112

JURUSAN HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Masalah ketenagakerjaan pada umumnya menyangkut dengan masalah kemanusiaan yang tidak terlepas dari masalah struktur politik, Hankam, Hukum dan Ekonomi bangsa Indonesia.

Adanya permintaan tenaga kerja dari luar negeri serta banyaknya tenaga kerja yang ingin bekerja di luar negeri menimbulkan berbagai masalah tentang ketenagakerjaan. Seperti timbulnya pekerja yang tidak dengan izin resmi dari pihak berwenang atau tanpa melalui Dinas Tenaga Kerja. Sehingga apabila timbul permasalahan yang menyangkut tenaga kerja tersebut Dinas Tenaga Kerja tidak bisa berbuat banyak karena tenaga kerja tersebut bekerja di luar negeri tanpa izin dan sepengetahuan Dinas Tenaga Kerja.

Sehingga dengan demikian adalah suatu hal yang sangat menarik untuk melaah permasalahan tenaga kerja ini khususnya peran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam hal pembinaan TKI untuk dibekujakan di luar negeri.

Adapun permasalahan yang berkenaan dengan judul skripsi ini adalah :

1. Sejauhmana peranan Dinas Tenaga Kerja dalam pembinaan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri,
2. Kendala apa saja yang timbul dengan Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri,
3. Bagaimanakah penyelesaian jika terjadi pemulangan tenaga kerja yang ilegal.

Setelah dilakukan penelitian secara kepustakaan dan di lapangan pada Dinas Tenaga Kerja Kota Medan maka ditemukan hal-hal sebagai berikut :

1. Keberadaan dan kehadiran Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam hal hubungannya dengan pembinaan tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah merupakan suatu upaya Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas ketenagakerjaan khususnya bagi TKI agar tercapai dan terciptanya suatu hasil guna dan daya guna yang optimal dalam bidang ketenagakerjaan itu sendiri sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat di bidang ketenagakerjaan dan menjadikannya sumber pendapatan bagi negara.
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan umum, khususnya dalam bidang mengurusi ketenagakerjaan k luar negeri ini, Kantor Dinas Tenaga Kerja ini tidak bisa melepaskan diri dari penerapan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah Pancasila

KATA PENGANTAR

dan Undang-Undang Dasar 1945 baik dalam kedudukannya sebagai lembaga negara maupun dalam bidang pekerjaannya sebagai lembaga yang melayani kepentingan masyarakat terutama dunia ketenakerjaan pada umumnya.

3. Prinsip-prinsip yang dikandung Oleh kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan dalam hubungannya dengan Hukum Administrasi negara adalah dimana Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut adalah menjalankan fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang bersifat melayani yang struktur organisasinya dimulai dari pusat yaitu Kementerian tenaga Kerja. Fungsi-fungsi aparatur pemerintah yang terdapat di dalam kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Medan tersebut adalah merupakan aktivitas dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara dan juga kantor Dinas Tenaga kerja adalah merupakan pelaksanaan ketentuan perundang-undangan yang melingkupi perundang-undangan perihal ketenagakerjaan.
4. Pelaksanaan pengiriman tenaga kerja luar negeri merupakan aktivitas dari instansi pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja, Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia sendiri, dimana ketiga organ tersebut terwujud dalam tugas masing-masing yang ditujukan bagi kepentingan terselenggaranya pelaksanaan penempatan dan pengerahan tenaga kerja ke luar negeri secara baik.

